

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi di berbagai bidang yang sedang berlangsung di Indonesia telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik. Pemerintahan dimulai dari level pusat sampai ke daerah, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah disertai kekuasaan oleh rakyat untuk melaksanakan pemerintahan yang baik demi mewujudkan tugas dan fungsinya sebagai pelaksanaan pembangunan, pemberi layanan kepada masyarakat, serta pemberdaya masyarakat. Kebijakan pemerintah Indonesia menempatkan daerah sebagai objek pembangunan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menjadi landasan yuridis pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gagasan besar tentang Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah harus menyiapkan laporan keuangan berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan

Atas Laporan Keuangan (CALK). Penyusunan laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer; dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan; serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam perkembangan sektor publik di Indonesia terdapat fenomena yang sangat menguat terhadap tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik pusat maupun daerah. Dimensi akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial (keuangan). Terkait dengan penegakkan akuntabilitas finansial ini khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada *stakeholder*.

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hak publik, maka dari itu lembaga sektor publik selaku pihak manajerial harus memberikan ruang yang memadai kepada *stakeholders* baik yang berasal dari pihak internal maupun eksternal dalam mengakses laporan keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang telah digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang

dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Penyajian laporan keuangan pemerintah harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah seperti yang terdapat pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dengan diterbitkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP yang akan digunakan untuk diterbitkan menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan dan yang diharapkan dapat menjadi acuan, patokan serta standar untuk diterapkan dalam lingkup pemerintah, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah yang wajib untuk menyajikan laporan keuangan agar lebih terciptanya akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan keuangan daerah tersebut (Langelo,2015).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah daerah. Instrumen utama dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah anggaran pemerintah daerah, data yang secara periodik dipublikasikan, laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh agent yang independen (LAN, 2002).

Akuntabilitas dari sebuah laporan keuangan sangat penting bagi instansi pemerintah. Jika pemerintah memberikan informasi keuangan secara konsisten kepada masyarakat, maka kepercayaan masyarakat akan meningkat. Informasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah harus transparan dan terpercaya. Akuntabilitas terkait laporan keuangan salah satunya juga mencakup penyajian laporan keuangan, dimana pemerintah harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan.

Menurut Mardiasmo, (2002) aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami (Mulyana, 2006). Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah.

Walaupun Pemerintah Kota Kupang dalam tiga tahun terakhir, Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun BPK masih menemukan permasalahan pada pengelolaan keuangan pemerintah saat melakukan pemeriksaan atau audit tersebut antara lain, Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal pada Tiga Organisasi Perangkat Daerah di Kota Kupang (LKPD Tahun Anggaran 2020) dan masih terdapat pengelolaan pendapatan dan asset tetap belum memadai

(LKPD Tahun Anggaran 2021). Selain itu juga masih terdapat kasus korupsi yang dilakukan aparat pemerintah, seperti pada saat terjadi pandemi covid tahun 2019 dan 2020 ditemukan kasus korupsi pengadaan pakaian seragam, tas sekolah dan buku tulis untuk siswa tidak mampu sebesar 9,5 miliar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, dan tindak pidana kasus pemerasan dan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dilakukan tim satuan tugas Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT pada Kamis 7 April 2022 dengan barang bukti berupa uang tunai sebesar 15 (lima belas) juta rupiah.(kupang voxntt.com). Fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan buruknya akuntabilitas keuangan daerah yang meningkatkan peluang kebocoran dan menghambat kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat di Kota Kupang. Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas tidak saja disebabkan karena penyajian laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial. Sebagai konsekuensinya, penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari akuntabilitas keuangan daerah.

Penelitian berkaitan dengan pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan dalam penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian Putu Sri Wahyuni pada tahun 2014, dengan judul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten Bandung). Penelitian tersebut

menunjukkan pengaruh signifikan dan positif secara parsial dan simultan pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bandung. Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh Anies Iqbal Mustofa pada tahun 2012, dengan judul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Pematang Jaya”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pematang Jaya. Penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Shinta Deviyanti pada tahun 2021 dengan judul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Bogor”. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kota Bogor.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu peneliti termotivasi untuk menguji kembali penelitian yang dilakukan oleh Putu Sri Wahyuni pada tahun 2014, Anies Iqbal Mustofa pada tahun 2012 dan Shinta Deviyanti pada tahun 2021 Penelitian ini dilakukan di lokasi yang berbeda dengan lokasi penelitian di lakukan di SKPD pemerintahan kabupaten Bandung, Instansi pemerintahan kota Pematang Jaya dan Instansi Pemerintahan Kota Bogor

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah Kota Kupang.**

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian yang hendak dibahas yaitu: pengaruh penyajian Laporan keuangan dan aksesibilitas terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Kupang.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang?
- 2) Bagaimana Pengaruh Aksesibilitas terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah kota Kupang?
- 3) Bagaimana Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah kota Kupang?

1.4 Tujuan dan kemanfaatan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian.

Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah kota Kupang

- 2) Untuk mengetahui pengaruh Aksesibilitas terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah Kota Kupang

1.4.2 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Akademik

Secara akademik hasil dari penelitian ini dapat di jadikan referensi atau sumber untuk mahasiswa fakultas ekonomi, akuntansi keuangan dalam melakukan penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

2) Manfaat Praktis

sebagai masukan dalam memperluas wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah Kota Kupang